

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mutasi jabatan merupakan pemindahan jabatan lama ke jabatan yang baru. Mutasi juga merupakan pengisian jabatan yang lowong guna terpenuhinya sistem pemerintahan yang baik. Pemutasian jabatan yang dilakukan di Akhir masa Pemerintahan Suaidi Yahya memberikan suatu padangan Orientasi Politik yang berpojok pada kepemimpinannya selama dua periode. Aparatur Sipil Negara merupakan profesi bagi Pegawai Negeri sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Pelaksanaan tugas sebagai ASN (Aparatur sipil negara) selain diatur di dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 juga diatur dalam UU kepegawaian, (Ew Nela. 2020)

Orientasi Politik atau cara pandang yang berhubungan erat dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan baru dari sebuah tindakan seseorang untuk mendapatkan kekuasaan, hal tersebut merupakan kekuatan untuk menganalisa proses dari pemerintahan itu sendiri. Ada banyak faktor yang mempengaruhi orientasi politik yaitu isu-isu dan kebijakan politik. (Kaulan: 2023)

Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya diakhir jabatannya merotasi sejumlah pejabat Eselon II, hal tersebut membuat sejumlah pejabat Eselon II di pindahkan ke jabatan yang baru. Pelantikan tersebut dilakukan oleh Asisten III Sekretaris Kota Lhokseumawe "Said Alam Zulfikar" atas nama Wali Kota di aula

badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) pada jumat 8 juli 2022.

Negara merupakan kesatuan organisasi jabatan-jabatan yang menjalankan fungsinya berdasarkan tataran organisasi yang disusun sedemikian sistematisnya agar mampu mencapai tujuan negara secara kolektif dan berkesinambungan. Pencapaian tujuan tersebut diwujudkan melalui tindakan pemerintah yang merupakan penggerak nyata dari negara dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Tidak bisa dipungkiri, semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat saat ini juga semakin mendorong semakin berkembangnya tindakan pemerintah yang mampu mewartakan berbagai kompleksitas tersebut. Hal inilah yang diamini oleh (Satjipto Rahardjo) yang mengungkapkan bahwa hukum tidak berada dalam vakum melainkan harus melayani masyarakat tertentu.

Dalam artian, bahwa hukum bukanlah sesuatu yang *rigid* melainkan terus bergerak menyesuaikan diri dengan berbagai dinamika kehidupan masyarakat agar senantiasa mampu berjalan dengan efektif dalam memenuhi rasa keadilan bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Adanya tuntutan terhadap peningkatan kinerja pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan fungsi dan tugas-tugas pemerintah sangatlah diharapkan oleh masyarakat. Hal tersebut seringkali ditandai dengan maraknya berbagai aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan yang selama ini dirasakan seringkali sangatlah mengecewakan, terutama dalam hal menerjemahkan berbagai aspirasi dan kepentingan serta kebutuhan warga masyarakat.

Dalam upaya menjawab berbagai tuntutan tersebut, maka dilakukanlah perubahan-perubahan dalam aspek pemerintahan guna mengoptimalkan kinerja

pemerintah di dalam masyarakat. Salah satu perkembangan atau perubahan mendasar dilakukan melalui reformasi birokrasi dalam bidang tata kelola pemerintahan di Indonesia. Reformasi birokrasi merupakan sebuah agenda utama dalam era egalitarian saat ini yang semakin menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang mengamanatkan bahwa segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilangsungkan dengan berasaskan pada ketentuan hukum, bukan atas dasar kekuasaan semata (*machtsaat*). Seiring dengan semakin berkembangnya era reformasi saat ini, terlebih setelah empat(4) kali perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka terjadi pula perubahan mendasar.

Selain itu, mekanisme pengisian jabatan secara terbuka cenderung menimbulkan keambiguan terhadap peran dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang sebelumnya mengusulkan daftar calon pejabat kepada Walikota/Bupati sebagai Pejabat dan Pembina Kepegawaian Daerah. Mekanisme yang ada saat ini tidak memiliki standardisasi yang relevan dalam menilai kapabilitas dan profesionalitas calon pejabat, melainkan hanya mengutamakan keterbukaan dibandingkan akuntabilitas. Hal tersebut merujuk pada mekanisme pengisian jabatan secara terbuka yang memperbolehkan adanya perubahan jabatan yang diemban dari kualifikasi dasar yang dimiliki pejabat bersangkutan. Tidak hanya itu, dari segi pendanaan pun mekanisme ini cenderung kurang efisien dan berlebihan ketimbang apabila dilakukan pengisian jabatan yang dipilih secara sederhana atau melalui mekanisme pengangkatan langsung.

Pada awal Tahun, sebelumnya Wali Kota Suaidi Yahya pada tanggal 26 Januari 2022 pernah merombak kabinet pemerintahannya melalui upacara mutasi

pejabat eselon II, III dan IV di aula kantor Wali Kota Lhokseumawe. Aksi dari perombakan itu membuat jabatan sejumlah kepala dinas (kadis) yang akan ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt). Informasi diperoleh (portalsatu.com) pelantikan para pejabat eselon II, III dan IV itu turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Lhokseumawe yaitu Yusuf Muhamamd, Sekda Bukhari dan para asisten Setda.

Tabel 1.1

Daftar Pegawai Eselon II Sesudah Di Mutasi Jumat(8 juli 2022)

No	Nama	Jabatan Awal	Jabatan Sekarang
1.	Muslim.S.Sos.,	Kepala dinas sosial	kepala lingkungan hidup
2.	Ibrahim Abraham.Med	Kepala dinas pendidikan dan kebudayaan	Kepala dinas sosial
3.	Irsyadi.S Sos.,	Kepala dinas perpustakaan dan kearsipan	Staf ahli wali Kota bidang pemerintahan
4.	Ramli.S.Sos.M.Kes	kepala dinas pemuda,olahraga dan pariwisata	Kadis pustaka dan kearsipan
5.	Syuib.S.Sos.,	kepala dinas lingkungan hidup	Kepala dinas pemuda olahraga
6.	Zulkifli.S.Ag.Mp.d	Kepala satuan polisi pamong Praja	Kepala dinas pendidikan dan kebudayaan
7.	Salahuddin.,Sp.d	Kepala BAPPEDA	Kepala dinas kelautan ,perikanan,pertahanan dan pangan
8.	Safaruddin	Kepala Dinas PUPR	Kepala BAPPEDA
9.	Drs.Ridwan Jalil	Kepala dinas pertahanan	Staf ahli bidang pembangunan,ekonomi,dan keuangan
10.	Bukhari.S.Sos.,	Staf ahli Wali Kota bidang pemerintahan	Kadis pertahanan
11.	Safwaliza.S.Kes	Plt.kadis kesehatan	kadis kesehatan

Sumber : Pusat Pengolahan Data dan Infomasi Kota Lhokseumawe

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Yang Di Mutasi Jumat(8 juli 2022)

Eselon II	Eselon III	Eselon IV
11 orang	34 orang	53 orang

Sumber : Pusat Pengolahan Data dan Infomasi Kota Lhokseumawe

Berdasarkan uraian mengenai berbagai isu yang menyangkut pengisian jabatan struktural secara terbuka yang belum dikenal secara umum oleh masyarakat tersebut, maka penulis menjadi sangat tertarik untuk membahasnya lebih lanjut, khususnya menyangkut mekanisme dan legitimasi pengisian jabatan struktural secara terbuka tersebut, dalam sebuah karya tulis atau skripsi yang berjudul: Orientasi Politik Wali Kota Suaidi Yahya dalam mutasi pejabat Eselon II di Kota Lhokseumawe tahun 2022. Berdasarkan pandangan penulis mengenai mutasi jabatan yang terjadi secara tiba-tiba dan tanpa adanya persiapan terhadap perombakan pengisian jabatan yang di lakukan oleh Wali Kota Suaidi Yahya di akhir jabatannya, hal ini menjadi kajian peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa terjadinya mutasi jabatan di lingkungan pemerintah kota Lhokseumawe di akhir masa jabatannya Walikota Suaidi Yahya?
2. Apakah ada indikasi *Political Interest* terjadinya mutasi jabatan?

1.3 Fokus Penelitian

Untuk menghindari permasalahan yang terlalu luas, maka peneliti hanya memfokuskan pada satu (1) jabatan saja dalam mutasi pejabat Eselon II yang di

mutasi oleh Wali Kota Suaidi Yahya di akhir masa jabatannya sebagai Walikota Lhokseumawe.

1.4 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas. Hal ini diperlukan apa yang sebenarnya dicari peneliti sehingga memberikan arahan dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa terjadinya mutasi jabatan di akhir masa jabatannya Suaidi Yahya dan apakah ada indikasi politik kepenetingan terkait pemutasian yang dilakukan Wali Kota Suaidi Yahya dalam Mutasi pejabat Eselon II Di Kota Lhokseumawe Tahun 2022.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian proposal ini maka manfaat dari penelitian ini adalah berdasarkan:

1. Manfaat Teoritis

1. Dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk lebih menyempurnakan penelitian yang sama.
2. Menjadi sumber informasi bagi pembaca untuk mengetahui bagaimana sikap politik Wali Kota Suaidi Yahya memutasi jabatan Eselon II diakhir masa jabatannya.

2. Manfaat Praktis

1. Memberikan sumber informasi bagi penulis untuk mengetahui sikap politik yang terjadi dalam mutasi jabatan Eselon II tahun 2022 di Kota Lhokseumawe.
2. Memberikan sumber informasi dan menambah wawasan bagi penulis untuk mengetahui teori dan praktik di lapangan tentang pemutasian jabatan di tingkat pemerintahan.